

HUBUNGAN TUGAS KEHUMASAN DENGAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Boby Toding¹

Abstrak

Boby Toding, Hubungan Tugas Kehumasan dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dibawah bimbingan Drs. M.Z Arifin M. Si, selaku dosen pembimbing I, dan Hikmah, S. Sos. M. A, selaku dosen pembimbing II, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tugas kehumasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan untuk mengetahui penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini dan wawancara, kemudian teknik analisis data serta untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan korelasi Rank Spearman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Hubungan Tugas Kehumasan dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dengan perhitungan hasil jawaban responden 0,60 dengan hubungan koefisien tinggi.

Kata Kunci : Tugas Kehumasan, Pemberian Informasi, Keterbukaan Informasi Publik

Pebdahuluan

Latar Belakang Masalah

Kebutuhan informasi dewasa ini menuntut adanya keterbukaan informasi, agar kebutuhan informasi sekarang bisa di terima oleh masyarakat. Di Indonesia keterbukaan informasi merupakan suatu penyelenggaraan Negara dan Pelayanan Publik sebagai Negara demokrasi dan keterbukaan informasi juga sebagai pengawasan peyelenggaraan Negara. Di pemerintahan provinsi Kalimantan Timur pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah dilakukan. Informasi mengenai pembangunan, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik harus dapat di terima oleh seluruh masyarakat kaltim.

¹ Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : bobytoding@gmail.com

Humas pemerintah selalu mencoba dan bekerja agar informasi dapat diterima oleh seluruh masyarakat kaltim. Ada beberapa media yang dimiliki dan juga ada kerjasama dengan media lokal seperti media cetak, elektronik. Media cetak yang dimiliki yaitu bulletin berupa buklet. Ada pula jenis publikasi yang digunakan pemerintah kaltim adalah jumpa Pers yaitu kegiatan yang dilakukan oleh humas pemerintah yang mengundang media dan akan akan diliput oleh media.

Dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas Kaltim masih berjalan, tetapi masih banyak hal yang menjadi kendala dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kalimantan Timur. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pada saat ini jumlah penduduk Kalimantan Timur mencapai 4,1 juta jiwa dan luas wilayah daratannya yaitu 129.066,64 km² (*Biro Humas dan Protokol Kaltim*).

Implementasi Keterbukaan informasi publik di setda Prov. Kaltim masih belum merata atau belum semua masyarakat kaltim memperoleh informasi atau pesan-pesan yang di sampaikan oleh Biro Humas Kaltim. Seperti di kabupaten Mahakam Ulu, yang memang saat ini masih terkendala oleh sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian diatas diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Tugas Kehumasan Dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan yang hendak dijawab dari penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan Tugas Kehumasan Dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian jadi lebih terarah secara jelas, maka perlu di tetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui tentang hubungan tugas kehumasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dapat diungkapkan bahwa penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian secara teoritis selain menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, tetapi juga pada manajemen kehumasan yaitu Humas Pemerintah dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik, kemudian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta sebagai referensi pada penelitian-penelitian mendatang mengenai Tugas Kehumasan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian sebagai bahan evaluasi dalam tugas kehumasan dengan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Dasar Teori

Teori Psikologi Komunikator

Dalam Proses komunikasi seorang komunikator akan sukses apabila ia berhasil menunjukkan *Source Credibility*, artinya menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Kepercayaan komunikan kepada komunikator ditentukan oleh keahlian komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia dipercaya (Onong Uchjana Effendy, 2003: 305). Dalam teori Lasswell (1948) menyebutkan komunikasi sebagai *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*. Dalam teori ini penulis menggunakan *Who Says* berarti siapa yang berbicara, artinya ketika komunikator berkomunikasi yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. Ia tidak dapat menyuruh pendengar memperhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Aristoteles dalam (Jalaluddin Rachmat, 2012: 252) menyebut karakter Komunikator ini sebagai *Ethous*

Kehumasan

Humas merupakan aktivitas komunikasi dua arah dengan publik, yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya dan saling membantu atau kerjasama. Pengertian humas tidak hanya tidak sekedar hanya komunikasi yang memiliki tujuan tetapi dalam mencapai tujuan itu, humas harus memiliki strategi-strategi atau formula-formula yang hanya dapat dilakukan oleh humas tidak dapat dilakukan oleh yang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Humas Pemerintah

Humas pemerintah adalah aktivitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan publik pada lembaga atau individu penyelenggara pemerintah untuk menciptakan citra yang positif instansi pemerintahan.

Tugas Kehumasan

Dalam setiap kegiatan manajemen kehumasan pasti memiliki tugas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatannya agar dalam mencapai tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tugas humas harus dapat dilaksanakan dengan

maksimal agar penyebaran atau pemberian informasi oleh pemerintah terlebih khusus di biro humas dan protokol kaltim dapat di peroleh maksimal oleh seluruh masyarakat kaltim.

Peran Humas Pemerintah

Peranan humas dalam instansi pemerintahan memang sangat vital karna menjadi sarana penghubung antara instansi pemerintah dengan publik dan sesama internal yaitu atasan dengan bawahan dan sebaliknya. Peran humas memang sangat vital yaitu bagaimana seorang humas bukan hanya ahli dalam berkomunikasi saja tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk meyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.

Metode Komunikasi Humas

Humas adalah aktivitas komunikais dua arah dengan publik (perusahaan/organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling percaya, dan saling penertian. Untuk mencapai tujuan humas itu sendiri memang sangat diperlukan metode komunikasi humas yang baik, agar setiap hubungan internal maupun eksternal dapat berlangsung dan peran humas itu sendiri semakin jelas bahwa perannya sangat diperlukan dalam metode komunikasinya

Bentuk Kegiatan Humas

Pada umumnya kegiatan humas ditujukan kepada dua jenis sasaran/publik yaitu publik internal dan publik eksternal. Dalam setiap relasi yang bangun oleh seorang humas melalui setiap keggiatan humas yang keluar maupun di dalam instansi atau lemabaga harus dapat memberikan dampak baik bagi instansi maupun lembaga. Untuk humas pemerintah kaltim diharapkan juga dalam setiap bentuk kegiatan humas ini dapat juga mewujudkan keterbukaan informasi yang baik agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik.

Media Komunikasi Humas

Untuk menjangkau khalayak tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan humas, adakalanya penggunaan media massa pers, radio televisi tidak sesuai, apalagi jika khalayak hanya terdiri dari beberapa kelompok kecil saja.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian dikukuhkan sebagai undang-undang, merupakan ciri-ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. UU KIP sebenarnya memiliki tiga sumbu utama: Transparansi, Partisipasi, dan

Akuntabilitas publik. Transparansi menyangkut keterbukaan informasi pada badan publik untuk dapat diakses masyarakat. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan/kebijakan pemerintah. Akuntabilitas publik menunjukkan dorongan bagi badan-badan publik untuk bertanggung jawab pada publik atas program/kebijakan yang dilaksanakannya.

Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam BAB II asas dan tujuan bagian satu, asas, pasal 2 yang telah diatur di dalam UU No 14 Tahun 2008.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Kewajiban badan publik atau biro humas di pemerintahan dalam pemberian informasi publik harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia agar informasi yang diberikan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Instansi pemerintah sebagai badan publik, wajib menyediakan informasi dibawah kewenangannya yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Informasi publik yang harus diumumkan secara berkala meliputi: informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan keuangan, dan informai lain yang diatur oleh peraturan perundangan.

Kewajiban Badan Publik

Seluruh badan publik yang ada di pemerintahan seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi yang sebagaimana telah diatur dala undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 67):

H₀: Tidak terdapat hubungan tugas kehumasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada Biro Protokol dan Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

H₁: Terdapat hubungan tugas kehummasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada Biro Protokol dan Humas pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

Rumus hipotesis matematikanya adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \rho = 0 \quad H_a : \rho \neq 0$$

Definisi Konsepsional

Sehubungan dengan itu maka disini penulis akan merumuskan konsep yang berhubungan dengan variable yang dimaksud.

1. Tugas Kehumasan

Tugas kehumasan adalah suatu kegiatan yang utama dan rutin dilakukan dalam manajemen yang meliputi memberikan informasi, mengelola informasi, menyampaikan informasi, memberikan pemahaman, menampung aspirasi dengan komunikasi dua arah antara lembaga dengan publiknya, baik internal maupun eksternal.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik yaitu bentuk komunikasi dalam pengelolaan informasi yang memiliki klasifikasi informasi publik seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap sehingga menjadi sarana dalam pengoptimalan pengawasan publik dan menjamin hak warga negara khususnya warga kalimantan timur.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang meneliti dan melakukan pengamatan pada gejala, peristiwa atau fenomena komunikasi sebagai objek, dimana pengamatan fenomena komunikasi bisa memunculkan pertanyaan tentang tingkat hubungan atau pengaruh antara dua konsep atau lebih.

Definisi Operasional

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan indikator-indikator dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tugas kehumasan (Variable Bebas) yaitu Memberikan Informasi, Mengelolah Informasi, Menyampaikan Informasi, Memberikan Pemahaman, Menampung Aspirasi
2. Keterbukaan Informasi Publik (Variabel Terikat) yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib di umumkan secara Serta-Merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Populasi, Sampel dan Sampling

Karena jumlah populasi penelitian tidak besar, maka tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan sensus, yaitu semua anggota pupulasi digunakan sebagai sampel, dan responden yang akan mengisi angket/kuisisioner dalam metode pengumpulan data penelitian ini. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah 31 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara peneliti mengumpulkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Kuesioner (Angket), daftar pertanyaan yang dibuat penulis kemudian akan di isi oleh responden yaitu seluruh pegawai Biro Humas.
- b) Wawancara, penulis melakukan wawancara langsung di Biro Humas dan Protokol Pemerintah Kalimantan Timur untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.
- c) Penulis menggunakan dokumen yang mendukung dalam penulisan, beberapa literatur-literatur berhubungan dengan penelitian yang mendukung penelitian analisis kuantitatif.

Alat Pengukur Data

Pengukuran adalah upaya pemberian tanda angka atau bilangan pada suatu objek atau peristiwa dengan aturan-aturan tertentu untuk member nilai-nilai pada variable. Pada penelitian ini penulis menggunakan Skala Likert yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 93).

Gradasi	Bobot
Sangat Baik, Selalu, Menarik	5
Baik, Sering, Biasa Saja	4
Kurang Baik, Kadang-Kadang, Kurang Menarik	3
Tidak Baik, Hampir Tidak Pernah, Tidak Menarik	2
Sangat Tidak baik, Tidak Pernah, Sangat Tidak Menarik	1

Sumber: Sugiyono, 2010: 93

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2010: 147).

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data koefisien korelasi *Rank Spearman* (Sidney Siegel, 2011: 256), yaitu sebagai berikut:

Jika proporsi angka itu banyak maka harus dipergunakan suatu faktor korelasi (T) di dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

$$T = \frac{t^3}{12}$$

Dimana t adalah banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu, 12 adalah bilangan tetap. Sedangkan untuk menghitung r_s digunakan rumus:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X^2 \cdot \sum Y^2}}$$

Dimana, $\sum X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$ dan $\sum Y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

t adalah masing-masing nilai yang sama

Jika tidak ada nilai yang sama untuk setiap variabel maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, kita juga harus mengetahui secara pasti gambaran umum dan lokasi penelitian agar ketika dalam penelitian dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai gambaran umum dan lokasi penelitian khususnya di Biro Humas dan Protokol, gambaran instansi atau lembaga, struktur lembaga, lokasi secara geografis, data sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi biro humas dan protokol kaltim

Gambaran Umum Biro Humas dan Protokol

Biro humas dan protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara umum dibentuk untuk mempublikasikan atau menyampaikan kebijakan-kebijakan dan hasil pembangunan pemerintah kepada masyarakat.

Lokasi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian bertempat di Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda, Kode Pos 75121 Kalimantan Timur, No Tlp. (0541) 741001 Fax. (0541) 737762-742111, Indonesia.

Struktur Biro Humas dan Protokol

Seperti halnya dengan instansi lainnya, biro humas dan protokol prov. Kaltim juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagian, dan pelaksana.

Visi dan Misi Biro Humas dan Protokol

Visi dari biro humas dan protokol Prov. Kaltim adalah “*Terwujudnya Hubungan Masyarakat dan keprotokolan secara profesional dalam meningkatkan*

Citra Positif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur". Lalu Misi "Membentuk opini positif publik melalui pelayanan kehumasan dan keprotokolan"

Sumber Daya Manusia Biro Humas dan Protokol

Sumber daya manusia d pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 54 pegawai.

Hasil Penelitian

Identitas Responden

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan identitas responden seperti jenis kelamin, usia, jabatan, dan tahun masuk. Penyajian data identitas responden secara lengkap dapat dilihat pada penjelasan dibawah.

Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 31 responden, diketahui bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang di peroleh dari penelitian ini:

Usia Responden

Kategori usia yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari usia <20 tahun, 20-30 tahun, 30-40 tahun, >40 tahun. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka responden yang berusia <20 tahun yaitu 0 responden atau 0%, kemudian responden yang berusia 20-30 tahun yaitu 13 responden atau 41,40%, kemudian responden yang berusia 30-40 tahun yaitu 10 responden atau 32,30%, yang terakhir yaitu responden yang berusia >40 tahun yaitu 8 responden atau 25,80%. Untuk lebih jelasnya, data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tahun Masuk Responden

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat 31 responden, diketahui responden dalam penelitian ini memiliki tahun masuk bekerja yang berbeda-beda. Kategori tahun masuk responden dalam penelitian ini yaitu >2010, 2010-2015, dan >2015. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah responden yang tahun masuk bekerjanya <2010 ada 9 responden atau 29,03%, kemudian responden yang tahun masuk bekerjanya tahun 2010-2015 yaitu 19 responden atau 61,30%, dan yang terakhir yaitu jumlah responden yang tahun masuk bekerjanya >2015 yaitu 3 responden atau 9,67%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Pengelompokkan skor rata-rata jawaban responden akan dihitung dengan menggunakan rumus interval. Pengelompokan didasarkan pada kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi (lihat pada tabel 3.4).

Rata-Rata Kriteria Jawaban Responden

Skor	Kriteria	Variabel X	Presentase	Variabel Y	Presentase
31-55	Sangat Rendah	-	-	-	-
56-80	Rendah	-	-	-	-
81-105	Sedang	-	-	-	-
106-130	Tinggi	4	20	1	7
131-155	Sangat Tinggi	16	80	14	93
Total		20	100	15	100

Sumber: Hasil pengolahan kuisisioner penelitian tahun 2016

Analisis Data

Analisis Korelasi Rank Spearman (Spearman Rho Rank-Order Correlations)

Perhitungan korelasi dari Rank Spearman (r_s) dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{2465 + 2433,5 - 1695}{2 \sqrt{2465 \cdot 2433,5}}$$

$$r_s = \frac{3203,5}{2 \sqrt{2465 \cdot 2433,5}}$$

$$r_s = \frac{3203,5}{2 \sqrt{5998577,5}}$$

$$r_s = \frac{3203,5}{2.2449,20}$$

$$r_s = \frac{3203,5}{4898,40}$$

$$r_s = 0,654$$

$$r_s = 0,65$$

Dari hasil perhitungan diatas, tingkat korelasi r_s sebesar 0,65. Bila menggunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut:

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang

0,60-0,799	Tinggi
0,80-1000	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono (2008: 214)

Dengan demikian nilai r_s di interval koefisien 0,60-0,799 terdapat tingkat hubungan yang tinggi antara Tugas Kehumasan dengan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Humas Kalimantan Timur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi koefisien Rank Spearman yaitu 0,60 sehingga terdapat tingkat hubungan yang tinggi antara Tugas Kehumasan dengan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Humas Kalimantan Timur. Selanjutnya berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian yang berjudul hubungan tugas kehumasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada biro humas dan protokol Pemerintah Provinsi Kaltim ialah menggunakan teori psikologi komunikator yaitu *Ethous* yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam (Jallaludin Rachmad, 252: 2012), dalam hal ini menggunakan dimensi kredibilitas.

Ketika komunikator memiliki kredibilitas dalam berkomunikasi atau penyampaian pesan, maka pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Dari kredibilitas komunikator, terdapat komponen kepercayaan yaitu komunikator dinilai jujur, adil, bermoral dan etis. Kemudian dalam hal penelitian ini hubungan tugas kehumasan dengan implementasi keterbukaan informasi publik yaitu biro humas ketika menjalankan tugasnya memiliki kredibilitas dalam hal pemberian informasi, mengolah informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa *ethous* dalam hal ini kredibilitas komunikator yaitu Biro Humas Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki sikap jujur, bermoral, adil dan etis dalam menjalankan tugas kehumasan sehingga dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik untuk pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Tugas Kehumasan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Tugas kehumasan sudah sangat baik yaitu memberikan informasi, mengelola informasi, menyatukan persepsi dan lain-lain, dan juga pelaksanaan KIP di biro humas juga telah berjalan dengan baik.
2. Dalam penelitian ini juga penulis melihat tugas kehumasan dan keterbukaan informasi publik masih ada kekurangan seperti pemberian informasi pendidikan dan pengetahuan alam yang masih kurang terlebih pada media

yang di gunakan dalam pemberian informasi seperti koran atau pun website. Dan juga yang masih terdapat kekurangan yaitu partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan dan juga dalam memberikan kritik dan saran karna pelaksanaan KIP juga dapat berjalan dengan baik jika masyarakatnya diikutsertakan dalam pelaksanaannya.

3. Dapat disimpulkan pula berdasarkan hasil perhitungan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman yang diketahui bahwa nilai r_s yaitu 0,65 dengan tingkat hubungan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara Tugas Kehumasan dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kaltim.

Saran

Berikut ini adalah saran yang diberika penulis kepada biro humas yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pemberian informasi yang berisi tentang pendidikan dan pengetahuan umum untuk masyarakat harus lebih di perbanyak lagi yang di upload melalui website Pemprov. Kaltim agar informasi yang diperoleh juga dapat mencerdaskan bangsa sehingga juga dampaknya nanti website Pemprov. Kaltim akan lebih banyak lagi yang mengunjungi untuk mendapatkan informasi sebagai sumber informasi yang relevan.
2. Biro Humas dan Protokol dapat menyusun serta membuat kegiatan seminar atau diskusi bersama masyarakat agar masyarakat juga dapat melihat dan memberikan kritik dan saran secara proporsional di setiap agenda kerja dalam memberikan informasi sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan infoimasi publik

Daftar Pustaka

Buku

- Suprpto, Tommy. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Caps.
- Riswadi. 2009. Ilmu Komunikasi (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumadiria, Haris. 2014. Sosiologi Komunikasi Massa (Cetaka Pertama). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyana, Deddy. 2011. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taufiq, Rohmat. 2013. Sistem Informasi Manajemen, Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengguna. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Nova, Firsan. 2012. Republic Relations. Bandung: Media Bangsa
- Ardianto, Elvinaro. 2013. Handbook Of Public Relations, pegantar Komperhensif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

- Yulianita, Neni. 2012. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung: Pusat Penertiban Universitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung.
- Morissan. 2010. Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional. Jakarta: Kencana.
- Uchjana, Onong. 2009. Human Relations dan Publik Relations. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Wing Wahyu. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Wirman, Syafri. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga
- Ardianto, Elvinaro dkk. Komunikasi Massa, Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama. Media.
- Rudy, Teuku May. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung: Refika Aditama
- Rakhmat, Jalaluddin. 2012. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2012. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siegel, Sidney. 1992. Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Gramedia
- Ruslan, Rosady. 2012. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Panjaitan, Dumaida. 2012. “Peran Humas Eksternal Pemerintah Kota Bontang Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Pembangunan” Skripsi tidak diterbitkan. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Mulawarman.
- Palupi, Dian. 2008. “Hubungan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) Dengan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kepegawaian Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD”. Skripsi tidak diterbitkan. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Internet

- Rivani, Alfinita. S. 2015. *Analisis “Job Description” Pada Subag Umum & Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan* (<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1733> diakses pada 12 november 2015)
- <http://dokumen.tips/documents/pengertian-keterbukaan.html> (diakses pada 27 januari 2016, 13:20)

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/387-keterbukaan-informasi-publik-dalam-undang-undang-nomor-14-tahun-2008>
(diakses pada 27 januari 2016, 13:10)

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=142011> (diakses pada 1 februari 2016, 08:50)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zA11WKq38YcJ:repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5021/10.%2520BAB%2520II%2520TINJAUAN%2520PUSTAKA.doc%3Fsequence%3D5+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id> (diakses pada 1 februari 2016, 08:52)